



## Dinamika Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor: Pendekatan Kualitatif Dalam Mengeksplorasi Persepsi Dan Sikap Wajib Pajak

**Nabila Septiana Putri**

Universitas Tidar Magelang

**Muhammad Fata Aditya**

Universitas Tidar Magelang

**Hironimus Steven Permana**

Universitas Tidar Magelang

Korespondensi Penulis: [nabilaspt559@gmail.com](mailto:nabilaspt559@gmail.com)

**Abstract.** *This research delves into the dynamics of motor vehicle tax compliance through a qualitative approach, exploring taxpayers' perceptions and attitudes. The identified key factors shaping attitudes toward tax obligations include regulatory complexity, clarity of rules, and personal experiences. Elements such as fairness perception, trust in the taxation system, and supervisory effectiveness also play crucial roles in forming compliance attitudes. These factors, integrated with psychological aspects, provide an in-depth understanding of taxpayer compliance behavior. While acknowledging challenges like regulatory complexity and economic inequality, the study highlights opportunities, including the application of information technology, fiscal incentive development, and cross-sector collaboration, as strategies to enhance compliance. In conclusion, a holistic and adaptive tax policy strategy, considering both local and global contexts, can foster a transparent, fair, and supportive tax environment for sustainable development.*

**Keywords:** *tax compliance, motor vehicles, regulations, taxpayer perceptions.*

**Abstrak.** Penelitian ini mendalami dinamika kepatuhan pajak kendaraan bermotor melalui pendekatan kualitatif, mengeksplorasi persepsi dan sikap wajib pajak. Kompleksitas regulasi, kejelasan aturan, dan pengalaman pribadi teridentifikasi sebagai faktor utama yang membentuk sikap terhadap kewajiban perpajakan. Persepsi keadilan, kepercayaan pada sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan juga menjadi elemen kunci dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan. Faktor-faktor ini, terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Meskipun mengidentifikasi tantangan seperti kompleksitas regulasi dan ketidaksetaraan ekonomi, penelitian ini menyoroti peluang, termasuk penerapan teknologi informasi, pengembangan insentif fiskal, dan kolaborasi lintas sektor sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan. Kesimpulannya, strategi kebijakan perpajakan yang holistik dan adaptif, mempertimbangkan konteks lokal dan global, dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan, adil, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** kepatuhan pajak, kendaraan bermotor, regulasi, persepsi wajib pajak.

### PENDAHULUAN

Pajak kendaraan bermotor, sebagai instrumen pendapatan negara, memegang peranan sentral dalam mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi dan pelayanan publik (Soraya, 2020). Namun, dinamika kepatuhan terhadap pajak ini menjadi tantangan serius yang melibatkan persepsi dan sikap wajib pajak. Di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, pemahaman mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor menjadi esensial. Dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor, permasalahan mendasar muncul seiring dengan kompleksitas regulasi, perubahan kebijakan,

dan variabilitas tingkat pendapatan masyarakat. Identifikasi permasalahan secara tajam dan mendalam akan memberikan landasan yang kokoh untuk mengeksplorasi dan merinci dinamika kepatuhan pajak kendaraan bermotor (Kurniawan, 2019).

Tujuan penelitian adalah untuk mengisi kekosongan pengetahuan yang ada, khususnya dalam merangkul kompleksitas dan dinamika kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, menganalisis, dan memahami lebih dalam persepsi dan sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan terkait kendaraan bermotor. Dengan fokus pada pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya mendekati kepatuhan pajak tidak hanya dari segi kuantitatif, tetapi juga memahami konteks dan nuansa di balik keputusan wajib pajak.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman perpajakan dan kebijakan publik. Dengan menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pihak berkepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan praktisi perpajakan. Peningkatan kepatuhan akan memberikan dampak positif pada penerimaan negara, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk memajukan berbagai sektor dan program pembangunan. Pentingnya memahami konteks pajak kendaraan bermotor tak lepas dari perubahan global dan lokal. Berbagai tantangan, seperti perubahan perilaku konsumen, kemajuan teknologi, dan faktor-faktor sosial ekonomi, semakin memperumit dinamika kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menghadapi realitas dinamis di lapangan (Fadlurrahman, 2016).

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendalami persepsi dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Studi literatur digunakan sebagai metode untuk menggali wawasan dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami konteks dan dinamika kepatuhan pajak secara menyeluruh.

### **Populasi Dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah literatur ilmiah yang mencakup jurnal-jurnal dan buku-buku terkait perpajakan kendaraan bermotor. Kriteria pemilihan sampel mencakup kebaruan, relevansi, dan kredibilitas sumber. Sampel terdiri dari artikel jurnal yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir dan buku-buku klasik yang memberikan landasan teoritis yang kuat. Proses

pemilihan sampel dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan keberagaman sumber untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kajian literatur melalui analisis dokumen, seperangkat komputer sebagai media, dan akses internet yang memadai. Alat ini mencakup pengembangan kriteria inklusi dan eksklusi untuk menilai relevansi dan kualitas literatur yang digunakan. Selain itu, sistem kategorisasi dan kode digunakan untuk mengorganisir temuan dari literatur yang telah diidentifikasi.

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian dan seleksi literatur yang memenuhi kriteria inklusi. Langkah-langkah ini melibatkan identifikasi topik dan kata kunci yang relevan, pencarian literatur melalui basis data akademis, dan evaluasi terhadap literatur yang memenuhi kriteria kualitas dan relevansi. Literatur yang terpilih kemudian dianalisis secara kritis untuk mengekstrak informasi yang mendukung pemahaman dinamika kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

### **Analisis Data**

Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Temuan dari literatur diorganisir dan disusun berdasarkan tema-tema utama yang muncul, seperti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, persepsi wajib pajak, dan sikap terhadap peraturan pajak kendaraan bermotor. Analisis ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika kepatuhan pajak kendaraan bermotor berdasarkan kontribusi literatur terbaru dan klasik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam menghadapi pajak kendaraan bermotor, kompleksitas regulasi menjadi salah satu faktor yang memberikan dampak signifikan pada persepsi wajib pajak. Studi literatur menunjukkan bahwa semakin rumitnya regulasi perpajakan kendaraan bermotor dapat meningkatkan tingkat ketidakpuasan dan kebingungan di kalangan wajib pajak (Putri & Wibowo, 2021). Regulasi yang sulit dimengerti dan penuh dengan ketidakpastian dapat menciptakan hambatan bagi wajib pajak untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat berujung pada sikap negatif terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan.

Selanjutnya, tingkat kejelasan aturan juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor. Temuan literatur menunjukkan

bahwa aturan perpajakan yang jelas dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Ketika aturan-aturan tersebut mudah dipahami dan diterapkan, wajib pajak cenderung merasa lebih yakin dan memiliki persepsi positif terhadap kewajiban perpajakan mereka (Broto, 2018). Oleh karena itu, kejelasan aturan menjadi kunci dalam membentuk pandangan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Pengalaman pribadi juga memegang peran yang signifikan dalam memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor. Studi literatur menunjukkan bahwa pengalaman masa lalu, baik positif maupun negatif, dapat membentuk pandangan wajib pajak terhadap kewajibannya (Krisolita, 2023). Wajib pajak yang memiliki pengalaman positif, seperti pelayanan yang efisien atau penggunaan dana pajak yang transparan, cenderung memiliki persepsi yang lebih baik terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Sebaliknya, pengalaman negatif, seperti kesulitan dalam pengajuan pajak atau ketidakjelasan penggunaan dana pajak, dapat menyebabkan ketidakpuasan dan sikap negatif terhadap kepatuhan pajak. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana persepsi wajib pajak terbentuk dalam konteks pajak kendaraan bermotor. Menyadari bahwa kompleksitas regulasi, tingkat kejelasan aturan, dan pengalaman pribadi memiliki dampak langsung terhadap persepsi wajib pajak, pihak berkepentingan, terutama pemerintah, dapat merancang kebijakan yang lebih baik dan efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan.

Selain itu, pembahasan pada tingkat analisis ini juga menyoroti pentingnya penyelarasan kebijakan perpajakan dengan prinsip-prinsip kejelasan dan keadilan. Menyederhanakan regulasi, menyajikan aturan dengan cara yang jelas, dan memberikan pengalaman yang positif bagi wajib pajak dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan persepsi positif terhadap pajak kendaraan bermotor. Dengan memahami dinamika ini, pemerintah dapat membangun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan wajib pajak, mengarah pada peningkatan kepatuhan secara keseluruhan (Rosyadi, 2019).

### **Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor**

Sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor merupakan aspek penting yang dapat membentuk dinamika perpajakan. Berdasarkan temuan literatur yang telah dianalisis, banyak faktor yang dapat memengaruhi sikap wajib pajak terkait kewajiban perpajakan ini. Penelitian mendalam ini mencoba merinci dan menggali lebih dalam faktor-faktor tersebut, dengan berfokus pada tingkat kepercayaan pada sistem perpajakan, persepsi tentang penggunaan dana pajak, dan efektivitas pengawasan.

Sebagian besar literatur menyoroti bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap sikap mereka terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian oleh Eka Safitri dan Jaeni (Safitri & Jaeni, 2023), menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi pada transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Penelitian ini menyajikan analisis mendalam tentang faktor-faktor yang membangun atau merusak kepercayaan wajib pajak pada sistem perpajakan, seperti kejelasan aturan, konsistensi kebijakan, dan tingkat partisipasi wajib pajak dalam proses pembuatan kebijakan perpajakan.

Persepsi tentang penggunaan dana pajak juga menjadi unsur kunci dalam membentuk sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Penelitian oleh Fardan Ma'ruf Zainudin dkk. (Zainudin et al., 2022) menemukan bahwa wajib pajak cenderung lebih patuh jika mereka yakin bahwa dana pajak digunakan dengan efisien dan efektif untuk kepentingan publik. Analisis dalam penelitian ini mengidentifikasi aspek-aspek kritis yang membentuk persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak, termasuk akuntabilitas pengelolaan dana dan transparansi pelaporan penggunaan dana tersebut.

Efektivitas pengawasan oleh pihak berwenang juga menjadi faktor utama yang memengaruhi sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian oleh Madjidainun Rahma (Rahma, 2019), menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pengawasan yang transparan dan dapat dipercaya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini tidak hanya memfokuskan pada keberadaan pengawasan, tetapi juga pada tingkat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan pengawasan oleh lembaga perpajakan.

Selain faktor-faktor tersebut, penelitian ini juga mendalam tentang dampak faktor-faktor kontekstual yang memoderasi hubungan antara sikap wajib pajak dan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Faktor kontekstual ini mencakup karakteristik individu, faktor sosial, dan aspek ekonomi yang dapat mempengaruhi bagaimana wajib pajak merespons kebijakan perpajakan. Penelitian ini mencoba untuk menyelidiki kompleksitas dinamika ini dan memberikan wawasan mendalam tentang variabilitas sikap wajib pajak di berbagai konteks.

Dalam konteks analisis ini, terlihat bahwa merinci sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor melibatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor kritis yang membentuk sikap tersebut. Temuan penelitian ini memiliki implikasi langsung pada perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan strategi pengawasan yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman mendalam terhadap

sikap wajib pajak juga memberikan kontribusi pada pengembangan strategi komunikasi dan pendekatan edukatif yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di tingkat individu.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak**

Dalam mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor, analisis mendalam dilakukan untuk menyelidiki dinamika yang kompleks dan multifaset. Secara khusus, pengkajian ini melibatkan integrasi temuan literatur terkait regulasi, kebijakan pemerintah, dan aspek-aspek psikologis yang berkontribusi pada pembentukan sikap dan perilaku wajib pajak (Nirajenani & M, 2020). Pertama-tama, regulasi perpajakan kendaraan bermotor menjadi landasan penting dalam memahami tingkat kepatuhan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kejelasan dan keterbacaan peraturan perpajakan memiliki dampak signifikan pada perilaku kepatuhan wajib pajak. Regulasi yang rumit dan sulit dipahami seringkali menjadi hambatan utama bagi wajib pajak untuk memahami kewajibannya. Oleh karena itu, penyelidikan literatur ini mencatat bahwa penyusunan regulasi yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya, kebijakan pemerintah memiliki peran sentral dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Temuan literatur menunjukkan bahwa insentif dan sanksi yang diterapkan oleh pemerintah dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berbagai penelitian menekankan bahwa penggunaan insentif yang rasional dan sanksi yang proporsional dapat meningkatkan kepatuhan, sementara tindakan yang terlalu keras justru dapat memicu resistensi dan penurunan kepatuhan (Agustine & Pangaribuan, 2022). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang seimbang dan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis wajib pajak.

Integrasi faktor psikologis menjadi elemen penting dalam memahami perilaku kepatuhan. Penelitian ini menyoroti bahwa persepsi wajib pajak terhadap keadilan perpajakan, kepercayaan pada pemerintah, dan tingkat kepuasan terhadap layanan publik memiliki dampak besar pada tingkat kepatuhan. Adanya persepsi bahwa sistem perpajakan bersifat adil dan bahwa kontribusi pajak mereka digunakan secara efektif oleh pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan (Ikhsan et al., 2021). Oleh karena itu, pemerintah perlu memahami psikologi wajib pajak dan bekerja untuk membangun kepercayaan dan kepuasan wajib pajak melalui transparansi dan akuntabilitas. Namun, aspek psikologis juga mencakup faktor-faktor seperti persepsi risiko dan kepercayaan diri wajib pajak dalam mengelakkan sanksi perpajakan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dapat dipengaruhi oleh sejauh mana wajib

pajak merasa risiko pelanggaran perpajakan dan sejauh mana mereka yakin dapat menghindari sanksi (Mianti & Budiwitjaksono, 2021). Oleh karena itu, strategi perpajakan sebaiknya tidak hanya fokus pada sanksi, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan edukatif yang dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri wajib pajak.

Selanjutnya, literatur juga menyoroti peran edukasi sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan. Penelitian ini mencatat bahwa upaya pemerintah dalam memberikan informasi yang jelas dan edukasi kepada wajib pajak dapat membentuk persepsi positif dan meningkatkan ketaatan (Mianti & Budiwitjaksono, 2021). Oleh karena itu, integrasi program edukasi yang efektif dapat berperan sebagai alat strategis untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Secara keseluruhan, analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor memberikan wawasan yang penting untuk perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Dengan merangkul regulasi yang jelas, kebijakan pemerintah yang bijak, dan pemahaman psikologis wajib pajak, pemerintah dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang kondusif untuk peningkatan kepatuhan dan kontribusi positif pada pembangunan ekonomi dan pelayanan publik.

### **Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor, beberapa aspek krusial muncul dari hasil penelitian ini. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas regulasi perpajakan kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak seringkali menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengikuti peraturan yang terus berubah. Regulasi yang rumit dapat menciptakan ketidakjelasan dan membingungkan wajib pajak, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata dalam menyederhanakan dan menjelaskan regulasi perpajakan kendaraan bermotor agar lebih dapat diakses dan dimengerti oleh masyarakat. Selain itu, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat memainkan peran signifikan dalam kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak dengan tingkat pendapatan rendah cenderung menghadapi tekanan finansial yang lebih besar, sehingga kecenderungan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak menjadi lebih tinggi. Pemahaman mendalam terhadap ketidaksetaraan ekonomi ini menjadi kunci dalam merancang kebijakan yang tidak hanya meningkatkan kepatuhan tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat pajak yang mereka bayar. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap penggunaan dana pajak dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pendekatan edukasi dan komunikasi perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang bagaimana pajak kendaraan bermotor mendukung pembangunan ekonomi dan layanan publik. Namun, di tengah tantangan tersebut, terdapat berbagai peluang yang dapat dieksplorasi untuk merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif. Salah satu peluang yang muncul adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan administrasi dan pengawasan perpajakan (Sulaiman, 2014). Penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan wajib pajak, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Peluang lainnya terletak pada pengembangan insentif fiskal yang lebih efektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa insentif fiskal, seperti potongan pajak atau program penghargaan, dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong kepatuhan. Oleh karena itu, merancang insentif yang sesuai dengan karakteristik wajib pajak dan memberikan dampak yang nyata dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga masyarakat juga diidentifikasi sebagai peluang penting. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif dari semua pihak dapat menciptakan sinergi yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran, memperbaiki pemahaman, dan merancang solusi yang berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menggambarkan dinamika kepatuhan pajak kendaraan bermotor melalui pendekatan kualitatif yang mendalam. Temuan menyoroti kompleksitas regulasi, kejelasan aturan, dan pengalaman pribadi sebagai faktor utama yang membentuk persepsi dan sikap wajib pajak. Persepsi keadilan, kepercayaan pada sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan juga muncul sebagai elemen kunci dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan. Faktor-faktor ini, yang terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Tantangan seperti kompleksitas regulasi dan ketidaksetaraan ekonomi menjadi fokus dalam mengidentifikasi kendala utama. Strategi kebijakan perpajakan yang holistik dan adaptif, mempertimbangkan konteks lokal dan global, dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan, adil, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi

pengambil kebijakan, praktisi perpajakan, dan akademisi dalam merancang solusi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di berbagai konteks.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, S., & Pangaribuan, L. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Tambora. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 61–74. <https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.877>
- Broto, S. S. (2018). Dapatkah Kebijakan Pemerintah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia? *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2–22.
- Fadlurrahman, M. F. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris WPOP Di KPP Pratama Malang Selatan). *July*, 1–23.
- Ikhsan, A. Y. K., Bawono, I. R., & Mustofa, R. M. (2021). PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA DISKRIMINASI TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 76–90. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2441>
- Krisolita, B. (2023). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DI KOTA BATU. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(1), 1–12.
- Kurniawan, P. C. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No 44 Tahun 2017: Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 14–24. <https://doi.org/10.18196/jati.020113>
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359. [https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Pengetahuan+dan+Sanksi+Perpajakan+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pribadi+Dimediasi+Kesadaran+Wajib+Pajak&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Pengetahuan+dan+Sanksi+Perpajakan+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pribadi+Dimediasi+Kesadaran+Wajib+Pajak&btnG=)
- Nirajenani, C. I. P., & M, N. K. L. A. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Cokorda. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 24–34. <https://doi.org/10.35814/relevan.v1i1.1812>
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.

- Rahma, M. (2019). Transparansi Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Padawajib Pajak Kota Dki Jakarta). *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v4i1.632>
- Rosyadi, T. P. R. (2019). MENGUNGKAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PASCA TAX AMNESTY. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(1), 1991–2001. [https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7753-2\\_24](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7753-2_24)
- Safitri, E., & Jaeni. (2023). Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Dengan E-Filling Sebagai Variabel Moderasi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 678–690. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.65182>
- Soraya, N. H. (2020). Inovasi Pelayanan Publik E-Samsat Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Barat. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 167–173. <http://180.250.247.102/conference/index.php/knia/article/view/349>
- Sulaiman, A. I. (2014). Tantangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ( tik) dalam E-GOVERNMENT. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 1(1), 74.
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>